



Judul : Komisi VIII Minta Menag Kaji Layanan KUA
Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

Komisi VIII Minta Menag Kaji Layanan KUA

KOMISI VIII DPR meminta Menteri Agama (Menag) agar melakukan kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan rencana kebijakan layanan keagamaan inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA).

"Komisi VIII meminta Menag menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR sebagai berikut. Melakukan kajian komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan tentang rencana kebijakan layanan keagamaan inklusif di KUA," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Dalam pelaksanaannya, kata Yaqut melanjutkan, layanan keagamaan inklusif di KUA tidak mengurangi peran lembaga keagamaan. Yaqut mengatakan peran-peran bernilai penting yang dijalankan lembaga keagamaan atau tempat ibadah tetap pada posisinya.

"Masyarakat nonmuslim yang selama ini melakukan pencatatan nikah di dukcapil dan bertempat tinggal jauh dari pusat kabupaten/kota dapat dibantu dengan KUA yang dijadikan hub pelayanan atas pencatatan nikah. Artinya, KUA menjadi hub untuk dukcapil," kata dia.

Saat ini, Yaqut mengatakan Badan Litbang dan Diklat Kemenag tengah menyiapkan landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan historis terkait dengan KUA sebagai pusat layanan semua agama. (Ant/S-1)